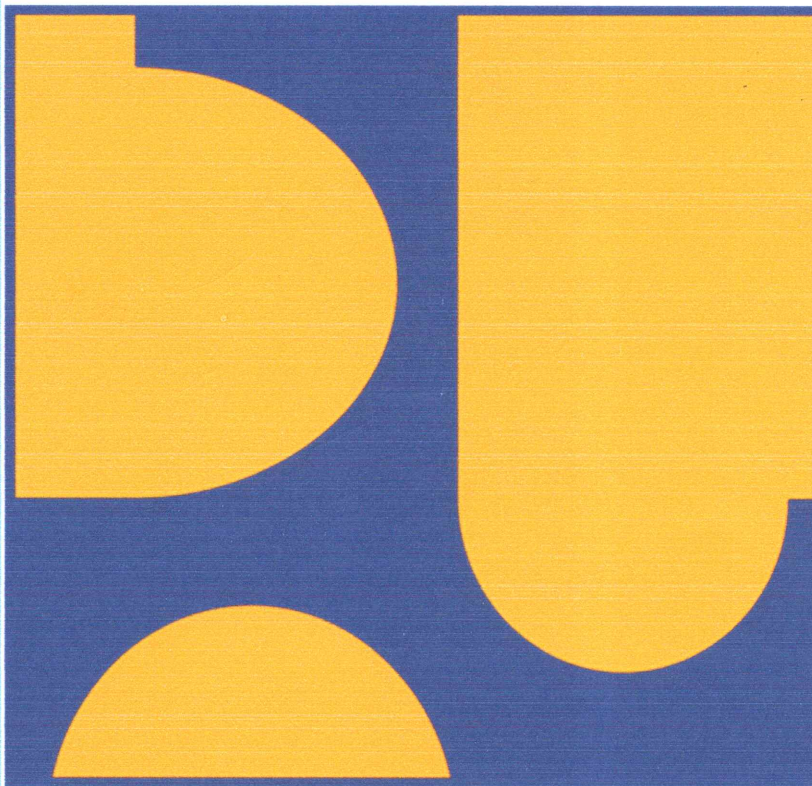
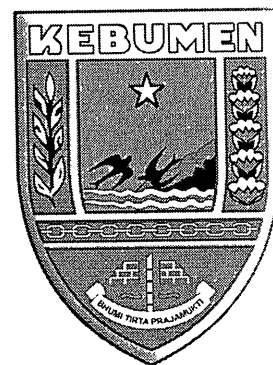




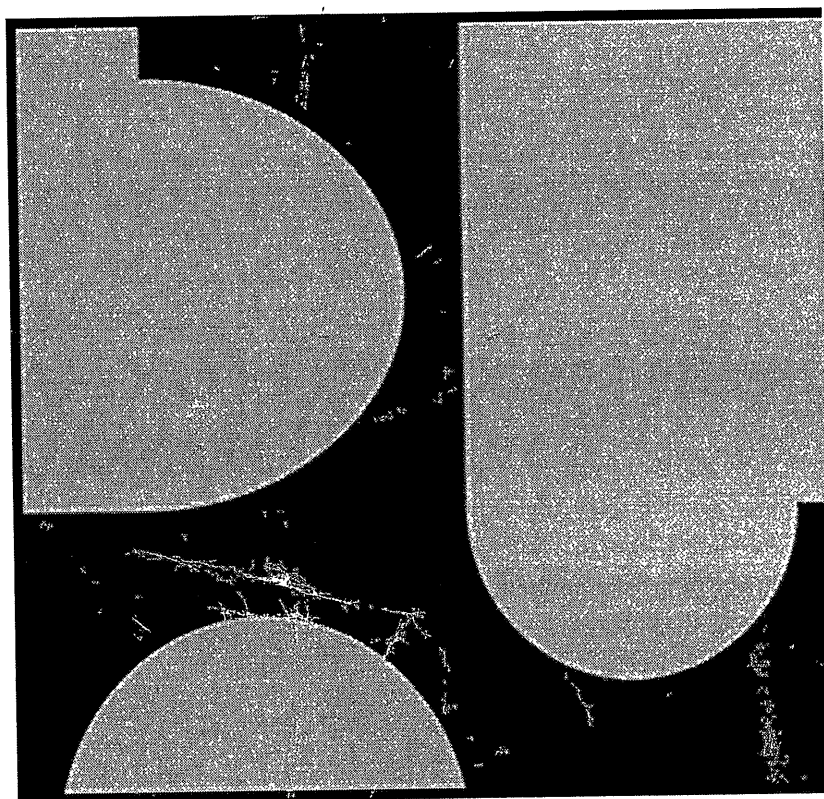
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023**



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2022



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang	1
1.2. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	2
1.3. Fungsi Strategi Organisasi dan Permasalahan Utama	18
1.4. Landasan Hukum.....	20
1.5. Sitematika Penulisan	23
BAB II	24
PERENCANAAN KINERJA	24
2.1. RENCANA STRATEGIS	24
2.2. Rencana Program,Kegiatan,Indikator Kinerja.....	29
2.3. Perjanjian Kinerja.....	42
BAB III	70
AKUNTABILITAS KINERJA.....	70
3.2. Capaian Kinerja Organisasi	70
3.3. Realisasi Anggaran Belanja.....	82
BAB IV.....	84
PENUTUP	84
Kesimpulan.....	84
Rekomendasi.....	85

Daftar Tabel

1.	Tabel 1 Jumlah Pegawai berdasarkan jenjang Pendidikan Tahun 2022.....	13
2.	Tabel 2 Jumlah Pegawai berdasarkan kualifikasi golongan Tahun 2022.....	13
3.	Tabel 3 Jumlah Pejabat struktural Tahun 2022.....	13
4.	Tabel 4 Sarana dan Prasarana Sampai Dengan Tahun 2022	14
5.	Tabel 5 Tujuan dan Sasaran Strategis.....	29
6.	Tabel 6 Indikator Kinerja Utama Dinas	41
7.	Tabel 7 Rencana dan Program	54
8.	Tabel 8 Realisasi dan Capaian Kinerja	72
9.	Tabel 9 Capaian Jalan dalam kondisi Mantap Tahun 2022	75
10.	Tabel 10 Ketersediaan Jalan Tahun 2015 – 2022	75
11.	Tabel 11 Capaian Pelayanan Air Bersih sesuai SPM Tahun 2022	77
12.	Tabel 12 Capaian Pelayanan Air Bersih Perpipaan Tahun 2015 2022	77
13.	Tabel 13 Sasaran Strategis Cakupan Pelayanan Air Bersih Perpipaan.....	78
14.	Tabel 14 Capaian Jaringan Irigasi Kabupaten dalam kondisi Baik	80
15.	Tabel 16 Capaian Realisasi keuangan Tahun 2022	83
16.	Tabel 17 Sisa Tender Anggaran	83

DAFTAR GAMBAR

1.	Gambar Struktur Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2022.....	4
2.	Gambar Prosentase Tingkat pelayanan Infrastruktur Wilayah	73
3.	Gambar Jalan Kondisi Mantap.....	76
4.	Gambar Capaian Air bersih.....	79
5.	Gambar Capaian Irigasi Kondisi Baik.....	80

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah Kami Panjatkan kepada Allah SWT, karena atas Limpahan Rahmat dan Karuniaya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, (LKJIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2022 dapat diselesaikan tepat waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan Akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan Kinerja Organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa Output maupun Outcome.

Disisi lain Laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan Kinerja beserta Permasalahan dan solusi dalam Pelaksanaan Tugas, Pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan (Peraturan IKU Instansi).

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui Laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen melalui Pelaksanaan Kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2022, Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Strategis 2021 – 2026 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 yang telah ditetapkan.

Kebumen, 6 Februari 2023

Kepala Dinas Pekerjaan Umum &

Penataan Ruang

Kabupaten Kebumen



JONI HERNAWAN, S.T.,M.T

NIP. 19700728 199803 1 006

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2022

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disahkan pada :

Hari : *Senin*

Tanggal : *6 Februari 2023*

Mengetahui

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Kebumen



JONI HERNAWAN, S.T.,M.T
NIP. 19700728 199803 1 006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan salah satu Dinas Teknis yang menangani urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan dasar, diantaranya urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mencakup Pemeliharaan dan Pembangunan Jalan, Jembatan, Sarana dan Prasarana Air Bersih, Drainase, Gedung, Selain itu juga memberikan Pelayanan Persewaan alat berat, Pelayanan Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Pemerintah yang baik (good governance).

Dengan disusunnya LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2022 diharapkan dapat :

1. Mendorong Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen di dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya secara lebih baik dan benar, berdasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2. Menjadi masukan dan umpan balik bagi Instansi lain maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja.
3. Menjamin kepercayaan masyarakat terhadap Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen di dalam Pelaksanaan Program/ Kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Materi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen ini dimulai dari penjabaran rencana Strategi (Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Strategi). Sampai dengan pengukuran keberhasilan rencana tersebut dengan penilaian atas aktivitas Program dan Evaluasi Kinerja

1.2. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, mempunyai tugas membantu Bupati dalam Melaksanakan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah, menjalankan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana dan program di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya dan penataan ruang, dan pertanahan;
- b. perumusan kebijakan di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya dan penataan ruang, dan pertanahan;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya dan penataan ruang, dan pertanahan;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya dan penataan ruang, dan pertanahan;
- e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya dan penataan ruang, dan pertanahan;
- f. pelaksanaan administrasi dinas;
- g. pengendalian penyelenggaraan tugas UPT pada Dinas; dan
- h. pelaksanaan tugas fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berperan sebagai urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah, terdiri atas Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Marga, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Cipta Karya, Bidang Tata Ruang dan Pertanahan dan UPT.

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, meliputi:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahi :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Bina Marga, membawahi :
 - a. Subkoordinator Perencanaan Bina Marga;
 - b. Subkoordinator Jalan; dan
 - c. Subkoordinator Jembatan.
- d. Bidang Cipta Karya, membawahi :
 - a. Subkoordinator Perencanaan Cipta Karya dan Bina Konstruksi;
 - b. Subkoordinator Bangunan Gedung; dan
 - c. Subkoordinator Bangunan Air Bersih.
- e. Bidang Sumber Daya Air, membawahi :
 - a. Subkoordinator Perencanaan Sumber Daya Air;
 - b. Subkoordinator Irigasi; dan
 - c. Subkoordinator Bangunan Lainnya.
- f. Bidang Tata Ruang, membawahi :
 - a. Subkoordinator Perencanaan Tata Ruang;
 - b. Subkoordinator Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang; dan
 - c. Subkoordinator Pertanahan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) wilayah :
 - a. UPTD PBPJJ Wilayah Gombong
 - b. UPTD PBPJJ Wilayah Karanganyar
 - c. UPTD PBPJJ Wilayah Kebumen
 - d. UPTD PBPJJ Wilayah Kutowinangun
 - e. UPT PJI SDA Sempor
 - f. UPT PJI SDA Kedungsamak
 - g. UPT PJI SDA Kaligending
 - h. UPT PJI SDA Bedegolan

Adapun rincian tugas pokok dan fungsi jabatan struktural pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut :

1. Uraian Tugas

a. Kepala Dinas

Mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah serta mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana dan program di Bidang Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, dan Pertanahan;
- 2) Perumusan kebijakan di Bidang Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, dan Pertanahan;
- 3) Pelaksanaan koordinasi di Bidang Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, dan Pertanahan;
- 4) Pelaksanaan kebijakan di Bidang Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, dan Pertanahan;
- 5) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan di Bidang Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, dan Pertanahan;
- 6) Pelaksanaan administrasi Dinas;
- 7) Pengendalian penyelenggaraan tugas UPT (Unit Pelaksana Teknis Dinas); dan
- 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

b. Sekretariat

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kersipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang melaksanakan tugasnya di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas..

Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, protokol, penanganan aduan, arsip, perpustakaan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas;
- f. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah di lingkungan Dinas;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Sekretariat membawahi :

- a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang umum dan kepegawaian meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, Kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan dinas.
- b) Sub Bagian Keuangan bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang keuangan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan dinas.

- c) Subkoordinator Perencanaan bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perencanaan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengoordinasian dan penyusunan, pengendalian dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan dinas

c. Bidang Bina Marga

Melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi jalan, jembatan, operasional dan pemeliharaan, dengan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan perencanaan bina marga;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan jalan;
- 3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan jembatan;.
- 4) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Bina Marga membawahi :

- a) Subkoordinator Perencanaan Bina Marga Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang bina marga. Meliputi penyelenggaraan perencanaan teknis program dan kegiatan pembangunan, serta menyiapkan bahan peningkatan operasional dan pemeliharaan jalan dan jembatan
- b) Subkoordinator Jalan yang bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang jalan meliputi penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan jalan, serta perencanaan pembangunan dan peningkatan jalan.
- c) Subkoordinator Jembatan yang bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang jembatan meliputi penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan jembatan serta perencanaan pembangunan dan peningkatan jembatan.

d. Bidang Cipta Karya

Melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan air bersih bangunan gedung, dan pembinaan konstruksi, dengan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyiapan dan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan cipta karya;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan bangunan gedung;
- 3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pembinaan konstruksi;
- 4) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan air bersih;
- 5) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Cipta Karya membawahi :

- a) Subkoordinator Perencanaan Cipta Karya dan Bina Konstruksi; mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perencanaan cipta karya dan bina konstruksi meliputi perumusan, perencanaan, penelitian, pengumpulan, pengelolaan, penyajian data perencanaan pembangunan beserta anggarannya, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, bimbingan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dan pengkajian serta perumusan pedoman persyaratan perencanaan cipta karya serta pelaksanaan administrasi teknik dan pembinaan konstruksi
- b) Subkoordinator Bangunan Gedung mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang bangunan gedung. meliputi perumusan, perencanaan, penelitian, pengumpulan, pengelolaan, penyajian data perencanaan pembangunan beserta anggaran di bidang bangunan gedung, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, bimbingan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dan pengkajian serta perumusan pedoman persyaratan perencanaan teknis bangunan gedung serta pelaksanaan administrasi teknik.

- c) Subkoordinator Air Bersih mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang air bersih meliputi perumusan perencanaan dan penyuluhan, pembinaan teknis dan sosialisasi pengelolaan air bersih, perbaikan lingkungan, penyediaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi serta pelaksanaan administrasi teknik.

e. Bidang Sumber Daya Air

Melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi irigasi, sungai, pantai, drainase, dan air baku, dengan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan irigasi;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan sungai, pantai, dan drainase;
- 3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan air baku;
- 4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Sumber Daya Air membawahi :

- a) Subkoordinator Perencanaan Sumber Daya Air yang bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perencanaan sumber daya air. Meliputi menyiapkan bahan penyelenggaraan perencanaan teknis program dan kegiatan pembangunan, peningkatan operasional dan pemeliharaan irigasi dan bangunan air lainnya.
- b) Subkoordinator Irigasi yang bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang irigasi. Meliputi menyiapkan pelaksanaan kegiatan pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, peningkatan dan rehabilitasi daerah irigasi serta pengelolaan system irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 (seribu) hektar.

c) Subkoordinator Bangunan Air Lainnya yang bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang bangunan air lainnya. meliputi pelaksanaan kegiatan pembangunan, peningkatan, operasi dan pemeliharaan bangunan air lainnya, serta pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai, pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai.

f. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan

Bidang Tata Ruang dan Pertanahan bertugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang serta pertanahan. dengan fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan perencanaan tata ruang;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pertanahan; dan
- d. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Tata Ruang dan Pertanahan membawahi

- a. Subkoordinator Perencanaan Tata Ruang mempunyai tugas tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perencanaan tata ruang. Meliputi menyiapkan bahan perumusan dan penyuluhan, pembinaan teknis dan sosialisasi pemanfaatan dan pengendalian tata ruang serta pelaksanaan administrasi teknik.
- b. Subkoordinator Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pemanfaatan dan pengendalian tata ruang meliputi menyiapkan bahan perumusan perencanaan dan penyuluhan, bahan pembinaan teknis dan sosialisasi pemanfaatan dan pengendalian tata ruang serta pelaksanaan administrasi teknik.

- c. Subkoordinator Pertanahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pertanahan meliputi menyiapkan perumusan, perencanaan, penelitian, pengumpulan, pengelolaan, penyajian data pertanahan, pembinaan, bimbingan, bantuan teknis pengkajian serta perumusan pedoman persyaratan, pelaksanaan administrasi pertanahan, pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah, penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah, penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah,
- g. Kepala Unit Pelaksana Teknis
bertugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/ atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional
Mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya. Subkoordinator melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.

2. Tata Kerja

Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Subkoordinator, Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Kepala Sub Bagian Unit Pelaksana Teknis dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten Kebumen sesuai dengan tugas pokok masing-masing, sebagai berikut :

- a. Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas bertanggung jawab dalam memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- b. Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Setiap pimpinan unit organisasi, pejabat fungsional dan pelaksana wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja..
- e. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas dari bawahannya diolah dan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Tabel 1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Sampai Dengan Bulan Desember Tahun 2022

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	Satuan
1	SD/MI	10	Orang
2	SLTP/MTS	13	Orang
3	SLTA/MA	126	Orang
4	Diploma I, II dan III	12	Orang
5	Diploma IV/ Strata I	33	Orang
6	Strata II	6	Orang
Total		200	Orang

Tabel 2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Golongan
Sampai Dengan Bulan Desember Tahun 2022

No	Kualifikasi Golongan	Jumlah	Satuan
1	Golongan I	14	Orang
2	Golongan II	126	Orang
3	Golongan III	51	Orang
4	Golongan IV	6	Orang
Total		200	Orang

Tabel 3
Jumlah Pejabat Struktural
Sampai Dengan Bulan Desember Tahun 2022

No	Jabatan Struktural	Jumlah	Satuan
1	Eselon II b (kadinan)	1	Orang
2	Eselon III a (sekdin)	1	Orang
3	Eselon III b (kabid)	4	Orang
4	Eselon IV a (kasubag/ka.UPT)	11	Orang
5	Eselon IV b (Ka.Tu di UPT)	4	Orang
Total		21	Orang

3. Sarana dan prasarana

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen, sampai dengan Tahun 2022 tersedia sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 4 SARPRAS
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Per 31 Desember Tahun 2022

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
	ALAT ANGKUTAN					
1	Gerobak Dorong	12			12	
2	Alat angkutan darat bermotor lainnya lainnya (dst)	1			1	Kendaraan Roda 3
3	Pick Up	4	5	1	10	
4	Semi Trailer	1			1	
5	Sepeda Motor	64	29	4	97	
6	Station Wagon	4	3		7	
7	Truck + Attachment		1		1	
	KOMPUTER					
8	Hard Disk	2			2	
9	Internet	1			1	
10	Komputer Jaringan lainnya	1			1	
11	Lap Top	59		1	60	
12	Monitor	1			1	
13	P.C Unit	22			22	
14	Peralatan Jaringan lainnya	6			6	
15	Peralatan Jaringan lainnya				1	
16	Peralatan Jaringan lainnya				4	
17	Peralatan Personal Komputer lainnya	2			2	
18	Personal Komputer lainnya	4			4	
19	Plotter (Peralatan Mainframe)	1			1	
20	Printer (Peralatan Personal Komputer)	67	5	4	76	
21	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	1			2	
	LAIN-LAIN					

22	A.C. Window	56	5		61	
23	Air Compressor (Alat Laboratorium Mekanika Tanah Dan Batuan)	2			2	
24	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	4	1		5	
25	Alat Kantor Lainnya	3	1		4	
26	Alat Rumah Tangga Lain-lain	90	9		99	
27	alat ukur lain-lain lainnya (dst)	3			3	
28	Amplifier	1			1	
29	Asphalt Finisher	1			1	
30	Asphalt Mixing Plant	1			1	
31	Audio Tape Reel Recorder		1		1	
32	Bangku Tunggu	3			3	
33	Brandkas	7	1		8	
34	Camera Electronic	10		1	11	
35	Camera film	1			1	
36	Camera Video	19		1	20	
37	Concrete Hammer Set	1			1	
38	Copy Board/Elektrik White Board	1			1	
39	Digital Audio Taperecorder		2		2	
40	Dispenser				10	
41	Dump Truck			4	4	
42	electric generating set lainnya (dst)	10	1		11	
43	excavator lainnya (dst)	8		1	9	
44	Filing Cabinet Besi	42	29		71	
45	Fire Extinguisher	1			1	
46	Gergaji		5		5	
47	Global Positioning System	6			6	
48	Grating Generator Unit	2	1		3	
49	Handy Cam	2			2	
50	Handy Talky (HT)	4			4	
51	Jam Elektronik		1		1	
52	Kipas Angin	5	16		21	
53	Kompur Gas (Alat Dapur)	1			1	
54	Kursi Biasa	44	69		113	
55	Kursi Fiber Glas/Plastik	7	26		33	
56	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV	6			6	
57	Kursi Kayu	58	6		56	
58	Kursi Kerja Pejabat Eselon	10			10	
59	Kursi Lipat	6	50		56	
60	Kursi Putar	23	23		46	
61	Kursi Rapat	138			138	
62	Kursi Tamu	8	17		22	
63	Layr LCD Projector/Infocus	2			2	
64	LCD Projector/Infocus	10			10	

65	Lemari Besi/Metal	16	10		26
66	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis		14		14
67	Lemari Kaca		1		1
68	Lemari Kayu	25	22		47
69	Lemari Penyimpan		5		5
70	Lemari Sorok		1		1
71	Loudspeaker	8	1		9
72	Meja 1/2 Biro	146	92		238
73	Meja Kerja		2		2
74	Meja Kerja Kayu	4			4
75	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1			1
76	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2			2
77	Meja Komputer	9	10		19
78	Meja Maket/Peta	1			1
79	Meja Rapat	48	11		59
80	Meja Resepsionis	1			1
81	Meja Tambahan		1		1
82	Meja Telepon	1			1
83	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	13		2	15
84	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	5		1	6
85	Mesin Pemotong Rumput	14			14
86	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1			1
87	mesin proses lainnya (dst)	8	9		17
88	Mimbar/Podium	1			1
89	Overhead Projector				1
90	Papan Nama Instansi	6	1		7
91	Peralatan Las Karbit		1		1
92	Peralatan Permainan lainnya	1	1		2
93	peralatan umum lainnya (dst)	5			5
94	perkakas bengkel kerja lainnya (dst)		10		10
95	Pesawat Kip	1			1
96	Pesawat Telephone	9	3	1	13
97	Peta				2
98	Pisau Lempar	1			1
99	pompa lainnya (dst)	19			19
100	Portable Water Pump	6			6
101	Power Amplifier	1			1
102	Pressure Vessel (Alat Laboratorium Proses/teknik Kimia)	1			1
103	Rak Besi	18	16		34
104	Rak Kayu	11	12		23
105	Rak Peralatan		2		2

106	Rol Meter	5			5	
107	Sice				13	Ruang tamu Kadinas, Kabid dan UPTD
108	Sofa	2	1		3	
109	Sound System	1			1	
110	Stabilizer		2		2	
111	Tandam Roller	6			6	
112	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1	1		2	
113	Televisi	9	6	1	16	
114	Tempat Tidur Kayu	1			1	
115	Theodolite (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	3			3	
116	Tool Cabinet Set		1		1	
117	Tool Kit Box		1		1	
118	Truck Loader + Attachment	1			1	
119	Truck Crane	1			1	
120	Uninterruptible Power Supply (UPS)	3			3	
121	Unit Power Supply	1	1		2	
122	Video Printer	1			1	
123	Water Level Meter		1		1	
124	Wheel Loader + Attachment		2		2	
125	White Board	3	14		17	
126	White Board Electronic	1			1	
127	Wireless	2	1		3	
128	Work Bench (Alat Laboratorium Proses Pembuatan Pola)	1			1	
129	Yeengler/Trailer				1	
	Total	1.274	563	22	1.881	

1.3. Fungsi Strategi Organisasi dan Permasalahan Utama

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra diperlukan Langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi dan kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen untuk periode tahun 2021-20226 adalah sebagai berikut :

1. Strategi Peningkatan Jalan dilaksanakan melalui kebijakan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan.
2. Strategi Peningkatan Pembangunan Drainase dilaksanakan melalui kebijakan Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase.
3. Strategi Peningkatan Akses Air Minum dilaksanakan dengan Pembangunan dan Pemeliharaan SPAM.
4. Strategi Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Jaringan Air Baku melalui kebijakan Peningkatan Koordinasi dan Keterpaduan Pengelolaan Sumber Daya Air.
5. Strategi Meningkatkan Pengelolaan Konservasi SDA melalui Peningkatan Pengelolaan Konservasi SDA.
6. Strategi Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, Lembaga Perwakilan Daerah dan Kualitas Administrasi Perkantoran serta Kapasitas Keuangan Daerah melalui kebijakan Peningkatan Sumber Daya Pegawai dengan mengirimkan peserta diklat, seminar dan lokakarya dan Peningkatan Pembiayaan Pengelolaan Sumber Daya Air dengan selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten.

Permasalahan Utama Yang Dihadapi

Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen tidak lepas dari berbagai permasalahan pelayanan berdasarkan tugas dan fungsinya. Permasalahan yang dihadapi antara lain:

- a. Masih rendahnya pelayanan infrastruktur jalan yang baik, hal ini dapat dilihat dari Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap tahun 2022, total panjang Jalan Kabupaten adalah 960,358 Km, Dimana Proporsi jalan Kabupaten Kebumen yang rusak berat masih terdapat 89,312 Km atau sebesar 9,30 % yang lokasinya tersebar di 22 wilayah yaitu kecamatan Ayah, Rowokele, Buayan, Sempor, Kuwarasan, Petanahan, Puring, Adimulyo, Karanggayam, Sadang, Karangsambung, Alian, Pejagoan, Petanahan, Sruweng Klirong, Poncowarno, Kutowinangun, Prembun, Ambal, Mirit dan Padureso.
- b. Meningkatnya kerusakan jalan akibat kondisi struktur tanah yang labil, curah hujan yang tinggi, bencana alam dan tingkat penggunaan jalan yang Over Load Over Dimension (ODOL).
- c. Masih adanya penyimpangan pemanfaatan ruang dari ketentuan pemanfaatan ruang.
- d. Masih kurangnya kesadaran masyarakat Kabupaten Kebumen dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- e. Masih ditemukan daerah yang mengalami krisis air bersih pada musim kemarau terutama daerah pegunungan, akibat ketiadaan sumber mata air atau sumber mata air mati serta kerusakan bangunan Sistem Pelayanan Air Minum (SPAM) karena pengelolaan yang tidak baik. Wilayah Kabupaten Kebumen yang berpotensi krisis air bersih meliputi Kecamatan Ayah, Rowokele, Buayan, Sempor, Karanggayam, Sruweng, Karangsambung, Sadang, Padureso, Alian Poncowarno dan Kemangguan
- f. Masih ditemukan genangan akibat kurang optimalnya fungsi drainase.
- g. Belum optimalnya rehabilitasi Daerah Irigasi untuk menunjang produktivitas pertanian guna mendukung kedaulatan pangan.
- h. Masih kurang penanganan kerusakan sungai, muara, dan pantai akibat banjir dan abrasi gelombang air laut.

1.4. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen disusun berdasarkan Undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku, antara lain adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010–2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 50);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 06 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 126);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
22. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
23. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

1.5. Sitematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2022 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum organisasi, struktur organisasi, data pegawai, keadaan sarana dan prasarana, fungsi strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen.

2. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini berisi uraian Ringkasan/ Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2022, Rencana Strategis (RENSTRA) yang hendak dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target Indikator Sasaran Strategis.

3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini berisi tentang Capaian Kinerja Organisasi dengan cara membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan beberapa tahun terakhir, membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis Organisasi, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada). Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah ditentukan, analisis dan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya, analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan realisasi anggaran.

4. BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi tentang simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang untuk meningkatkan kinerja, termasuk tinjauan umum capaian kinerja, permasalahan/ kendala, serta strategi peningkatan kinerja di masa datang.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

A. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen telah Menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu periode 2021-2026 dengan memberikan pelayanan terhadap pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, pembangunan air bersih, drainase, pembangunan gedung pemerintah, pembangunan/ pemeliharaan jaringan irigasi, sungai dan embung. Pelaksanaan pelayanan dijabarkan dalam Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang setiap tahun, mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2026

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun Langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program yang dilaksanakan di RPJMD 2021-2026 mengacu pada Permendagri 90 Tahun 2019 dimana jenis program, kegiatan dan sub kegiatan telah disediakan dalam peraturan tersebut. .

Program dan kegiatan pada dasarnya dibagi menjadi tiga urusan, yaitu :

- a. Pertama, program dan kegiatan teknis yang berhubungan dengan tugas dan fungsi kesekretariatan dan menjadi urusan semua OPD, namun tidak berhubungan langsung dengan sasaran dan tetap memberi dukungan terhadap program dan kegiatan yang secara langsung dalam mencapai sasaran Renstra OPD. Program dan kegiatan ini merupakan aktivitas manajerial dan perkantoran sebagai dukungan terhadap penyelenggaraan OPD sehari-hari seluruh bidang.
- b. Kedua, kelompok program dan kegiatan yang mendukung pemenuhan kebutuhan perencanaan OPD dan kewajiban sebagai OPD penghasil yang tercantum dalam Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan dan Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.
- c. Ketiga, program dan kegiatan teknis (core business) yang berhubungan langsung dalam pencapaian sasaran Renstra OPD atau dalam hal ini Urusan Wajib Pelayanan dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Rencana program dan kegiatan beserta indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama 5 (lima) tahun ke depan mejadi pedoman dan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan, anggaran, dan pelaporan selanjutnya.

B. Reviu Terhadap Visi dan Misi

1) Visi

Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang. Visi Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah :

**“ MEWUJUDKAN KABUPATEN KEBUMEN SEMAKIN SEJAHTERA,
MANDIRI, BERAKHLAK BERSAMA RAKYAT”**

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

a) Sejahtera

Terwujudnya suatu keadaan di mana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian sejahtera adalah Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya ketimpangan ekonomi, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga kesejahteraan masyarakat Kebumen merupakan suatu keadaan yang mencerminkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat telah terpenuhi secara berimbang yang ditunjang oleh stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Keadaan masyarakat dan setiap individu hidup dalam keadaan makmur, sehat dan damai berlandaskan kualitas sumber daya manusia dan lingkungannya. Dalam konteks kesejahteraan sosial, kondisi ini wajib diciptakan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan, membuka lapangan kerja dan memperluas kuantitas dan kualitas pelayanan publik.

b) Mandiri

Mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Kebumen memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung serta kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di sekitarnya sehingga mampu mencari solusi dan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimilikinya. Kemandirian ini akan didapatkan apabila

perekonomian yang akan dijalankan merupakan perekonomian yang berpihak pada masyarakat kebanyakan (wong cilik), ekonomi yang tumbuh melalui pemerataan, dan ekonomi yang bertumpu pada sektor-sektor yang berbasiskan pada potensi daerah dalam mencapai kemandirian daerah yang tangguh. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian kemandirian adalah meningkatnya daya saing daerah, dan meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian. Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian dapat dilihat dari kondisi infrastruktur dan peluang investasi. Daya saing sektor lokal dicapai dengan meningkatkan jumlah desa wisata mandiri, nilai tukar petani, persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan, peningkatan nilai produksi industri, nilai ekspor, dan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan.

c) Berakhlak

Menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai religius dalam setiap tindakan, sikap dan perilaku sehari-hari. Makna berakhlak berarti bahwa pembangunan di Kebumen tidak hanya mengejar pemenuhan pembangunan fisik semata, namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas rohani masyarakat yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Sehingga beberapa indikator untuk mengukur pencapaian pembangunan yang berakhlak di Kebumen adalah masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai – nilai religius yang tinggi, tanpa kehilangan kepribadian budaya Jawa yang andhap asor, memiliki solidaritas yang tinggi, mengedepankan kerukunan, menghormati keragaman dan peduli terhadap nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berkarakter.

Akronim dari Visi Bupati Kebumen adalah :

KEBUMEN SEMARAK

“Kebumen Sejahtera, Mandiri, Barakhlak Bersama Rakyat”

2) Misi

Dalam upaya pencapaian visi pembangunan daerah Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026, ditetapkan misi pembangunan daerah antara lain :

- a. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov terintegrasi
- b. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya
- c. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
- e. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Perangkat Daerah. Dalam dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi Perangkat Daerah. Misi ini dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi (kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan) pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas Langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi Perangkat Daerah.

Dalam perumusan misi tersebut di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen memperhatikan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kebumen yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Rumusan tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen mendukung terlaksananya Misi ke 1 (satu) dan Misi IV RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

Misi I : Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi

Tujuan dan Sasaran Misi I adalah :

1. Tujuan
 - a. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi
2. Sasaran
 - a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Misi IV : Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Tujuan dan Sasaran Misi IV adalah :

1. Tujuan
 - b. Mewujudkan percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan
2. Sasaran
 - b. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah

Tabel 4.1

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen
Tahun 2021-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	83	84	85	85,5	86
2	Mewujudkan percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	%	53,81	59,27	63,10	66,89	70,69

Sumber : Dinas PUPR Kab. Kebumen 2021

2.2. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja

Tujuan dan sasaran adalah merupakan kondisi yang diharapkan akan terwujud dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun yang akan datang. Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah OPD mengacu pada tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026. Uraian mengenai tujuan dan sasaran yang berkaitan dengan bidang pekerjaan umum, terutama sebagai OPD yang berkontribusi untuk pencapaian target Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Untuk mengukur keberhasilan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang maka perlu ditetapkan indikator dan target kinerja sasaran selama periode Renstra.

Tabel 5

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat			
MISI I : Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi	1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Peningkatan kualitas sistem dan aparatur pelayanan publik	1. Pembenahan Struktur dan Prosedur Birokrasi 2. Perbaiki sistem dan manajemen sumber daya aparatur serta peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur 3. Pelayanan publik yang prima
MISI IV : Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	1. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	1. Peningkatan konektivitas dan kualitas infrastruktur jalan serta infrastruktur prioritas lain yang mendukung pertumbuhan ekonomi 2.	1. Pengembangan Wilayah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah 2. pembangunan sistem jaringan prasarana jalan di antaranya berupa: a. Pengembangan jalan tol berupa pengembangan ruas jalan tol Cilacap – Yogyakarta b. Pengembangan jaringan jalan lintas selatan (JJLS)

			<p>dari Wawar – Tambak Mulyo – Jladri – Ayah – Bodo</p> <p>c. Pengembangan Rencana Jalan Lintas Kabupaten Banjarnegara (Banjarnegara – Kebumen – Batang dan Pekalongan)</p> <p>d. Peningkatan jalan menuju wisata yang mendukung Geopark Nasional Karangsambung-Karangbolong</p> <p>e. Penyediaan jalan menuju kawasan industri</p>
			<p>3. Pengembangan pada sistem jaringan prasarana lain di antaranya yang cukup signifikan berupa:</p> <p>a. Sistem penyediaan air minum (SPAM) Regional Keburejo</p>
			<p>4. Pengembangan Koridor Jalan Arteri Primer Wilayah Perkotaan Kebumen</p> <p>a. Koridor jalan arteri primer yang melewati wilayah Kelurahan Panjer, Kebumen, dan Kutosari</p> <p>b. Koridor jalan arteri sekunder yang melewati Kelurahan Tamanwinangun, Panjer, Kebumen, Bumirejo, dan Kutosari</p>

Untuk mencapai misi tersebut di atas maka perlu ditetapkan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen sebagai penjabaran kebijakan, dalam 5 (lima) tahun mendatang, meliputi program, kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen dan tetap mengacu pada program pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026.

Rencana program kerja dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2022 tercermin dalam pencapaian kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan melalui beberapa program sebagai berikut :

A. Sekretariat

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - d) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - b) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - f) Penyediaan Bahan/Material
 - g) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pada Tahun 2021 dilaksanakan pengadaan kendaraan sepeda motor 4 unit
 - b) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan
 - b) Pemeliharaan Mebel
 - c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B. Bidang Pelaksana Tekhnis Kegiatan

1. Program Penyelenggaraan Jalan

1. Kegiatan Penyelenggaran Jalan Kabupaten/Kota

a) Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan.

b) Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan

c) Survey Kondisi Jalan/Jembatan

Pada Tahun 2022 dilaksanakan Penyusunan Dokumen Survey Kondisi Jembatan

d) Pembangunan Jalan

Pada Tahun 2022 telah dilaksanakan Pembangunan pada ruas jalan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Karangsembung – Sadang, Pembangunan Jalan Pegeban - Somagede, dan Pembangunan Jalan Patukgawemulyo – Patukrejomulyo.

e) Pelebaran Jalan Menuju Standar

Pada Tahun 2022 telah dilaksanakan pekerjaan Pelebaran Jalan Geblug – Candirenggo, Jalan Karanggayam - kebakalan, Pelebaran Jalan kemujan - karangsari, Pelebaran Jalan Krakal – kaligending, Pelebaran Jalan Sidogede – Pejagatan dan Peningkatan Jalan Lokidang – Banjarnegara (Banprov).

f) Pemeliharaan Berkala Jalan

Pada Tahun 2022 telah dilaksanakan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Pahlawan Kebumen, Pemeliharaan Berkala Jalan Adiluhur – Kalipurwo, Pemeliharaan Berkala Ayah- Argopeni, Pemeliharaan Berkala Jalan Bumiagung - Wagirpandan (Pokir), Pemeliharaan Berkala Geblug – Candirenggo, Pemeliharaan Berkala Jalan Gentan – Miritpetikusan, Pemeliharaan Berkala Jalan Kepudang – Kaleng, Pemeliharaan Berkala Jalan Klirong - Pandan (Pokir), Pemeliharaan Berkala Jalan Korowelang – Mulyosri, Pemeliharaan Berkala Jalan Pahlawan Kebumen, Pemeliharaan Berkala Jalan Pandansari - Watulawang (Pokir), Pemeliharaan Berkala Jalan Petanahan – Pantai, Pemeliharaan Berkala Jalan Purwodeso – Petanahan, Pemeliharaan Berkala Jalan Selokerto – Buayan, Pemeliharaan Berkala Jalan Tanjungsari - Nampudad (Pokir), Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan Kabekelan - Lembupurwo (DAK), dan Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan Kambalan - Ambal (DAK),

g) Pemeliharaan Rutin Jalan

Pada Tahun 2022 telah dilaksanakan pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan kalibeji – sempor (Pokir), Pemeliharaan Rutin Jalan Pandan – Tanggulangin (Desa Tanggulangin) (Pokir), Pemeliharaan Berkala Jalan Adiluhur – Kalipurwo, Pemeliharaan Berkala Ayah- Argopeni, Pemeliharaan Berkala Jalan Bumiagung - Wagirpandan (Pokir), Pemeliharaan Berkala Geblug – Candirenggo, Pemeliharaan Berkala Jalan Gentan – Miritpetikusan, Pemeliharaan Berkala Jalan Kepudang – Kaleng, Pemeliharaan Berkala Jalan Klirong - Pandan (Pokir), Pemeliharaan Berkala Jalan Korowelang – Mulyosri, Pemeliharaan Berkala Jalan Pahlawan Kebumen, Pemeliharaan Berkala Jalan Pandansari - Watulawang (Pokir), Pemeliharaan Berkala Jalan Petanahan – Pantai, Pemeliharaan Berkala Jalan Purwodeso – Petanahan, Pemeliharaan Berkala Jalan Selokerto – Buayan, Pemeliharaan Berkala Jalan Tanjungsari - Nampudad (Pokir), Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan Kabekelan - Lembupurwo (DAK), dan Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan Kambalan - Ambal (DAK),

h) Pembangunan Jembatan

Pada Tahun 2022 telah dilaksanakan pekerjaan Pembangunan Jembatan Pengilon Ruas Jalan Kutowinangun - Poncowarno

i) Pemeliharaan Berkala Jembatan

Pada Tahun 2022 telah dilaksanakan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jembatan pada Ruas Jalan Karanggayam – Kebakalan, Pemeliharaan Berkala Jembatan pada Ruas Jalan Pandansari – Watulawang, dan Pemeliharaan Berkala Jembatan pada Ruas Jalan Tembono – Peniron

2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

1. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota.

- a) Penyusunan Rencana, kebijakan, Strategi dan Tekhnis SPAM
- b) Pembangunan SPAM di Kawasan Perdesaaan.

Pada Tahun 2022 telah dilaksanakan Pembangunan SPAM sebanyak 22 Paket baik dari dana DAK maupun dana lainnya, diantaranya Pembangunan SPAM Desa Depokrejo Kecamatan Kebumen (DAK), Pembangunan SPAM Desa Jembangan Kecamatan Poncowarno (DAK), Pembangunan SPAM Desa Kabuaran Kecamatan Prembun (DAK), Pembangunan SPAM Desa Kalibeji Kecamatan

Sempor (DAK), Pembangunan SPAM Desa Kaligending Kecamatan Karangsambung (DAK), Pembangunan SPAM Desa Kalipoh Kecamatan Ayah (DAK), Pembangunan SPAM Desa Karangtanjung Kecamatan Alian (DAK), Pembangunan SPAM Desa Karangtengah Kecamatan Poncowarno (DAK), Pembangunan SPAM Desa Kedungwaru Kecamatan Karangsambung (DAK), Pembangunan SPAM Desa Langse Kecamatan Karangsambung (DAK), Pembangunan SPAM Desa Seboro Kecamatan Sadang (DAK), Pembangunan SPAM Desa Selogiri Kecamatan Karanggayam (DAK), Pembangunan SPAM Desa Surotrunan Kecamatan Alian (DAK), Pembangunan SPAM Desa Triwarno Kecamatan Kutowinangun (DAK), Pembangunan SPAM Desa Wadasmalang Kecamatan Karangsambung (DAK), Pembangunan SPAM Desa Widoro Kecamatan Karangsambung (DAK), Pembangunan SPAM Desa Wonosari Kecamatan Karangsambung (DAK), Pembangunan SPAM Desa Jemur Kecamatan Pejagoan, Pembangunan SPAM Desa Karangsambung Kecamatan Karangsambung, Pembangunan SPAM Desa Kedunggong Kecamatan Sadang, Pembangunan SPAM Desa Kejawang Kecamatan Sruweng, Pembangunan SPAM Desa Wonoharjo Kecamatan Rowokele dan sebagainya.

a. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan

Pada Tahun 2022 telah dilaksanakan Peningkatan SPAM sebanyak 8 Paket dari dana (APBD), Peningkatan SPAM Desa Geblug Kecamatan Buayan, Peningkatan SPAM Desa Gunungsari Kecamatan Karanggayam, Peningkatan SPAM Desa Jatimulyo Kecamatan Petanahan, Peningkatan SPAM Desa Kalirancang Kecamatan Alian, Peningkatan SPAM Desa Karangtanjung Kecamatan Alian, Peningkatan SPAM Desa Kejawang Kecamatan Sruweng, Peningkatan SPAM Desa Sendangdalem Kecamatan Padureso, dan Peningkatan SPAM Desa Jatimulyo Kecamatan Petanahan Lanjutan

b. Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan

Rehabilitasi/Pemeliharaan SPAM Desa Rehabilitasi/Pemeliharaan SPAM Desa Totogan Kecamatan Karangsambung

3. Program Penataan Bangunan Gedung

- a. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
- b. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota
- c. Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota. Pada tahun 2021 telah dilaksanakan Pemeliharaan / Rehabilitasi Pagar Pendopo Rumah Dinas Bupati, Pemeliharaan / Rehabilitasi Bangunan Gedung Kantor, Pemeliharaan Pos Jaga Kejaksaan Negeri Kebumen, Pemeliharaan Gedung Koramil Rowokele, Pengembangan Prasarana dan Sarana Wisata Pantai Petanahan, Pintu Gerbang Otomatis Pendopo dan Pemeliharaan Taman Pendopo Kabumian, Rehabilitasi Gedung Dewan Pendidikan, Rehabilitasi Gedung KONI, Rehabilitasi Gedung PP Polri, Rehabilitasi Kantor Cendrawasih / DHC 45
- d. Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota
- e. Bantuan Tekhnis Pembangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota.
- f. Penilikan terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan

4. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

- a. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota. Pada tahun 2022 telah telah dilaksanakan kegiatan pengadaan semen / PC meliputi 26 kecamatan di kabupaten kebumen, Kecamatan Adimulyo (34 RT/RW), Kecamatan Alian (25 RT/RW), Kecamatan Ambal (9 RT/RW, Kecamatan Ayah (64 RT/RW), Kecamatan Bonorowo (11 RT/RW), Kecamatan Buayan (32 RT/RW), Kecamatan Kebumen 32 RT/RW), Kecamatan Klirong 12 RT/RW), Kecamatan Mirit (12 RT/RW) dan sebagainya.

5. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

- a. Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
- b. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagan Konstruksi.
- c. Penyelenggaraan system informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota.
- d. Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan
- e. Penertiban Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non kecil dan kecil)

6. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

- a. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
 - 1) Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
 - 2) Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota.
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota
 - 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota
 - 3) Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
- c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
 - 2) System Informasi Penataan Ruang
 - 3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten /kota.

7. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

- a. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya.
 - 2) Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
Terkendalanya Pembangunan Embung Krakal Desa Krakal kecamatan Alian
 - 3) Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya
Pemeliharaan Embung Kalirejo Desa Kalirejo Kecamatan Karanggayam,
Pemeliharaan Embung Rahayu Desa Rahayu Kecamatan Padureso, dan
Pemeliharaan Embung Tugu Desa Tugu Kecamatan Buayan.
- b. Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota.
- c. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
 - 1) Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa.

- 2) Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah (Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT), pada tahun 2022 telah dilaksanakan Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah Desa Cangkring Kecamatan Sadang, Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah Desa Gondanglegi Kecamatan Ambal, Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah Desa Kuwaru Kecamatan Kuwarasan, Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah Desa Logede Kecamatan Pejagoan, Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah Desa Panjatan Kecamatan Karanganyar, Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah Desa Sangubanyu Kecamatan Buluspesantren, dan Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah Desa Semanding Kecamatan Gombang.
- 3) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Cuntang Desa Kebagoran Kecamatan Pejagoan (DAK), Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Donorojo Desa Donorojo Kecamatan Sempor (DAK), Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Jogomuyo Desa Jogomuyo Kecamatan Buayan (DAK), Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Kaligesing Desa Kalisana Kecamatan Karangsembung (DAK), Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Kali Gombang Desa Sitiadi Kecamatan Puring (DAK), Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I kali Salak Desa Bumirejo Kecamatan Puring, Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Karangduwur Desa Karangduwur Kecamatan Petanahan, Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Mangunarjo Desa Mangunarjo Kecamatan Adimulyo, Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Tlepek Desa Tlepek Kecamatan Karangsembung, Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Wonokromo Desa Wonokromo Kecamatan Karangsembung Alian (DAK).
- 4) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
Tahun 2022 telah dilaksanakan Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I Bumirejo Desa Bumirejo Kecamatan Puring, Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I Kemujan Desa Kemujan Kecamatan Adimulyo, Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I Purwosari Desa Purwosari Kecamatan Puring, Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I Sidobunder Desa Sidobunder Kecamatan Puring.
- 5) Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi.

8. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.

a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota.

1) Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase

Pada Tahun 2022 telah dilaksanakan Pemeliharaan Drainase Desa Kedungbulus Kecamatan Prembun (P), Pemeliharaan Drainase Desa Tresnorejo Kecamatan Petanahan (P), Pemeliharaan Drainase Dukuh Buara RT 03 RW 01 Desa Rogodono Kecamatan Buayan (P), Pemeliharaan Drainase Jalan Kalijirek-Alian (P), Pemeliharaan Drainase Jalan Mertokondo - Karangsembung (lokasi depan Puskesmas Karangsembung sampai terminal colt Karangsembung) (P), Pemeliharaan Drainase Jogomertan - Gebangsari Desa Jogomertan Kecamatan Petanahan (P), Pemeliharaan Drainase Kalikendo Desa Sadang Kecamatan Sadang (P), Pemeliharaan Drainase Kedungsingih Desa Sadang Wetan Kecamatan Sadang (P), Pemeliharaan Drainase RT 02 RW 03 Desa Sawangan Kecamatan Alian (P), Pemeliharaan Drainase RT 03 RW 02 Desa Kabekelan Kecamatan Prembun (P), Pemeliharaan Drainase Silangsur kecamatan Bonorowo dan Pemeliharaan Drainase di 4 UPTD.

2) Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan

Pada Tahun 2022 telah dilaksanakan Pembangunan Drainase Jalan Kabupaten RT 01 RW 03 Desa Semanding Kecamatan Gombang (P), Pembangunan Drainase Kali Bakung Desa Karangtanjung Kecamatan Alian (P), Pembangunan Drainase Padeheman Desa Mekarsari dan Desa Babadsari Kecamatan Kutowinangun (P).

3) Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan

Pada Tahun 2022 telah dilaksanakan Rehabilitasi Saluran Drainase Korodor Jalan Mayjend Sutoyo.

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja Utama adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap pencernaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrument pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Pada sektor public seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematika tersebut timbul karena sektor public memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintah Sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Berdasarkan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2016-2021, indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen sebagai berikut

Tabel 5
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen
Tahun 2021-2026

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir Periode RPJMD (2026)
			2022	2023	2024	2025	2026	
A	Indikator Tujuan 1							
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	83,00	84,00	85,00	85,50	85,50	85,50
A.1.	Indikator Sasaran (IKU Urusan Pertanahan)							
	Persentase Penanganan Sengketa Lahan	%	100	100	100	100	100	100
B	Indikator Tujuan 2							
	Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks	53,81	59,27	63,10	66,89	70,69	70,69
B.1.	Indikator Sasaran (IKU Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)							
	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks	57,35	59,16	61,48	63,67	65,89	65,89

Tabel 6

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

Tahun 2021-2026

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD		TARGET CAPAIAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		CAPAIAN 2020 (%)	PERKIRAAN CAPAIAN 2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	2025 (%)	2026 (%)	(%)
1.	Persentase Infrastruktur Sumber Daya Air irigasi Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Baik	80	80	77,8	80	82,5	85	87,5	87,5
2.	Persentase Pelayanan Air Bersih Perpipaan	17,54	18,75	20	21,25	22,5	23,75	25	25
3.	Persentase Saluran Drainase dalam Kondisi Baik	15,98	15,98	15,98	17,04	18,01	19,98	20,04	20,04
4.	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik	80,13	80,13	81,14	81,14	82,15	83,16	83,84	83,84
5	Prosentase pekerjaan yang tersusun DEDnya	%	%	19	21	23	25	27	27
6	Persentase Jalan Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	70,94	70,94	74,23	76,23	79,48	82,23	85,18	85,18
7	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang Telah Dibina dan Nilainya Baik	44,92	44,92	44,92	50,15	55,08	60	64,92	64,92
8	Persentase Kesesuaian Lahan dengan Pola Ruang RTRW	75	75	91,15	91,25	91,35	91,45	91,55	91,55

Sumber : Dinas PUPR Kab. Kebumen 2021

Indikator sasaran ini menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen dan menjadi acuan dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Kebumen.

**2.3. Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Kebumen Tahun 2022.**

Terlampir:

/

/

/

/

/

/

/

/



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Alamat : Jalan H.M. Sarbini No. 99 Kebumen, Telepon (0287) 381128

Faks (0287) 382821 e-mail: dpupr.kebumenkab@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :


Nama : HARYONO WAHYUDI, S.T., M.T.
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Selanjutnya disebut Pihak Pertama


Nama : H. ARIF SUGIYANTO, SH
Jabatan : Bupati Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 11 Januari 2022

Pihak Kedua,

H. ARIF SUGIYANTO, SH


Pihak Pertama,

HARYONO WAHYUDI, S.T., M.T.
NKBUMEN401261999031004


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Tujuan :							
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	83				83
	Sasaran :							
	Tertanganinya Kasus Sengketa Lahan	Persentase Penanganan Sengketa Lahan	%	100				100
2	Tujuan							
	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks	53,81				53,81
	Sasaran :							
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks	57,35				57,35

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 23.441.256.000,-	
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp. 10.290.950.000,-	
3.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp. 8.409.857.000,-	
4.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp. 6.430.373.000,-	
5.	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp. 900.000.000,-	
6.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rp. 3.061.000.000,-	
7.	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp. 113.594.024.000,-	
8.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp. 387.224.000,-	
9.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp. 1.240.800.000,-	

Kebumen, 11 Januari 2022


 Bupati Kebumen
 H. APRI SUGIYANTO, SH


 Kepala Dinas Pekerjaan Umum
 dan Penataan Ruang
 HARYONO WAHYUDI, S.T., M.T.
 NIP. 197401261999031004



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Alamat : Jalan H.M. Sarbini No. 99 Kebumen, Telepon (0287) 381128

Faks (0287) 382821 e-mail: dpupr.kebumenkab@gmail.com

Website: www.dpupr.kebumenkab.go.id Kodepos 54316

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN I
TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : JONI HERNAWAN, S.T., M.T.
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. ARIF SUGIYANTO, SH
Jabatan : Bupati Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.


Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 29 September 2022

Pihak Kedua,


H. ARIF SUGIYANTO, SH

Pihak Pertama,


JONI HERNAWAN, S.T., M.T.
NIP. 19700728 199803 1 006

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN I TAHUN 2022
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**


No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Tujuan :							
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	83 Indeks	83 Indeks				83
	Sasaran :							
	Tertanganinya Kasus Sengketa Lahan	Persentase Penanganan Sengketa Lahan	100 %	100 %				100 %
2	Tujuan							
	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	53,81 Indeks	53,81 Indeks				53,81
	Sasaran :							
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	57,35 Indeks	57,35 Indeks				57,35

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	23.441.256.000	22.897.489.000	
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	10.290.950.000	12.134.132.000	
3.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	8.409.857.000	8.409.857.000	
4.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	6.430.373.000	7.262.895.000	
5.	Program Penataan Bangunan Gedung	900.000.000	4.806.000.000	
6.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	3.061.000.000	3.061.000.000	
7.	Program Penyelenggaraan Jalan	113.594.024.000	122.414.582.000	
8.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	387.224.000	343.869.000	
9.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.240.800.000	1.281.682.000	

Bupati Kebumen


H. ARIF SUGIYANTO, SH

Kebumen, 29 September 2022
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KABUPATEN KEBUMEN


JONI HERNAWAN, S.T., M.T.
NIP. 19700728 199803 1 006

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN I TAHUN 2022
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Tujuan :							
1	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat	83 Indeks	83 Indeks				83
	Sasaran :							
	Tertanganinya Kasus Sengketa Lahan	Persentase Penanganan Sengketa Lahan	100 %	100 %				100 %
2	Tujuan							
	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	53,81 Indeks	53,81 Indeks				53,81
	Sasaran :							
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	57,35 Indeks	57,35 Indeks				57,35

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KET
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	23.441.256.000	22.897.489.000	
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	10.290.950.000	12.134.132.000	
3.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	8.409.857.000	8.409.857.000	
4.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	6.430.373.000	7.262.895.000	
5.	Program Penataan Bangunan Gedung	900.000.000	4.806.000.000	
6.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	3.061.000.000	3.061.000.000	
7.	Program Penyelenggaraan Jalan	113.594.024.000	122.414.582.000	
8.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	387.224.000	343.869.000	
9.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.240.800.000	1.281.682.000	

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Triwulan			
					I (6)	II (7)	III (8)	IV (9)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Tujuan :							
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	83				83
	Sasaran :							
	Tertanganinya Kasus Sengketa Lahan	Persentase Penanganan Sengketa Lahan	%	100				100
2	Tujuan							
	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks	53,81				53,81
	Sasaran :							
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks	57,35				57,35

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KEBUMEN

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Perencanaan Administrasi Umum Keuangan dan Kepegawaian	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	17	dokumen	8	2	1	6
		Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12	bulan	3	3	3	3
		Jumlah Administrasi Barang Miik Daerah	1	Paket	1	0	0	0

		2	kegiatan	0	1	1	0
	Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan						0
	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Perangkat Daerah	12	bulan	3	3	3	3
	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	bulan	3	3	3	3
	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12	bulan	3	3	3	3

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN KEBUMEN

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Baik	Jumlah Daerah Irigasi yang terhabilitasi dan terpelihara	15	daerah irigasi	0	13	1	1
		Jumlah Bangunan konservasi SDA yang terbangun dan terpelihara	2	unit	0	0	0	2
		Jumlah Saluran Drainase Yang Dipelihara/ Direhabilitasi/ Dibangun	14	lokasi	0	0	0	14

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
 KEPALA BIDANG CIPTA KARYA
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 KABUPATEN KEBUMEN

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Triwulan			
					I (6)	II (7)	III (8)	IV (9)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Pelayanan Air Bersih Perpipaan	Persentase Pelayanan Air Bersih Perpipaan	10,39	%	0	0	0	10,39
1	Meningkatnya Bangunan Gedung Pemerintahan dalam Kondisi Baik	Prosentasi Bangunan Gedung Pemerintah Dalam Kondisi Baik	87,5	%	15,00	22,50	25,00	25,00
		Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang Telah Dibina dan Nilainya Baik	45	%	45	0	0	0
		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	25	25	25	25
		Persentase Bangunan dan Lingkungan yang Tertangani	100	%	0	26,62	35,50	37,88

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA BIDANG CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN KEBUMEN

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Kesesuaian Lahan Dalam Pola Ruang RTRW	Persentase Kesesuaian Lahan dengan Pola Ruang RTRW	91,51	%	0	0	0	91,51
		Prosentase Terwujudnya Penataan Ruang	75	%	0	0	0	75
		Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyusunan RTRW dan RRTR yang dilaksanakan	28	kegiatan	7	7	7	7
		Prosentase Terwujudnya Penataan Ruang	75	%	0	0	0	75
		Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang yang tersusun	2	dokumen	0	0	0	2
		Terlaksananya koordinasi TKPRD	12	kegiatan	3	3	3	3
		Jumlah Kegiatan Koordinasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kabupaten	12	kegiatan	3	3	3	3

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
 KEPALA BIDANG BINA MARGA
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 KABUPATEN KEBUMEN

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Infrastruktur Jalan Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	Persentase Jalan Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	74,12	%	9,50	18,53	32,57	13,52

1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Tersusun	Dokumen	5	5	105.432	5	108.595	5	111.853	5	111.853	5	111.853	5	111.853	5	549.586
1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun	Dokumen	12	12	245.234	12	252.590	12	260.168	12	260.168	12	260.168	12	260.168	12	1.278.328
1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	21.453.768	12	22.019.962	12	22.423.942	12	22.314.451	12	22.774.369	12	22.774.369	12	110.986.492
1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan ASN mendapatkan gaji dan Tunjangan	Bulan	14	14	20.067.094	14	20.385.688	14	20.709.060	14	21.037.283	14	21.370.431	14	21.370.431	14	103.569.556
1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan pembayaran honor penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun	Bulan	11	11	1.000.000	11	1.236.000	11	1.304.660	11	854.639	11	968.734	11	968.734	11	5.364.033
1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah aset /barang daerah yang dikelola dan diamankan	Paket	1	1	386.674	1	398.274	1	410.222	1	422.529	1	435.204	1	435.204	1	2.052.903
1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Paket	2	2	199.364	2	199.364	2	199.364	2	199.364	2	199.364	2	199.364	2	996.820

1	2.0 5	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah kegiatan bimbingan teknis	Kegiat an	2	2	199.36 4	2	199.36 4	2	199.36 4	2	199.36 4	2	199.36 4	2	996.820
1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administra si umum perangkat daerah	Kegiat an	12	12	644.18 9	12	659.72 2	12	659.72 2	12	659.72 2	12	659.72 2	12	3.252.463
1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/ peneranga bangunan kantor	Bulan	12	12	51.500	12	53.045	12	53.045	12	53.045	12	53.045	12	260.635
1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor	Bulan	12	12	87.550	12	90.176	12	90.176	12	90.176	12	90.176	12	443.078
1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	12	60.847	12	62.673	12	62.673	12	62.673	12	62.673	12	307.940
1	2.0 6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Bulan	12	12	22.200	12	22.200	12	22.200	12	22.200	12	22.200	12	111.000
1	2.0 6	7	Penyediaan Bahan/Materi	Jumlah bulan penyediaan bahan/ material	Bulan	12	12	104.22 0	12	104.22 0	12	104.22 0	12	104.22 0	12	104.22 0	12	521.100

1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	Jumlah bulan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	12	12	308.614	12	317.872	12	152	735.120	149	327.408	12	327.408	12	327.408	12	327.408	12	327.408	12	1.608.710	
1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Bulan	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	129	0	-	138	125	414.634	152	735.120	149	327.408	12	735.120	145	735.120	145	735.120	145	735.120	145	735.120	145	2.619.994
1	2.0 7	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	Jumlah unit kendaraan dinas operasional I atau Lapangan	4	0	-	9	125	187.384	12	504.470	11	504.470	16	504.470	48	504.470	48	504.470	48	504.470	48	504.470	48	1.700.794
1	2.0 7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya	125	0	-	125	125	127.250	125	127.250	125	127.250	125	127.250	500	127.250	500	127.250	500	127.250	500	127.250	500	509.000
1	2.0 7	7	Pengadaan Mebel	Unit	Jumlah unit pengadaan mebel	0	0	-	20	20	100.000	20	103.400	20	103.400	20	103.400	80	103.400	80	103.400	80	103.400	80	103.400	80	410.200
1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12	12	367.202	12	367.202	372.081	12	372.081	12	372.081	12	372.081	12	372.081	12	372.081	12	372.081	12	372.081	12	1.855.526
1	2.0 8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12	12	2.620	12	2.620	2.698	12	2.698	12	2.698	12	2.698	12	2.698	12	2.698	12	2.698	12	2.698	12	13.412
1	2.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber	12	12	204.582	12	204.582	204.583	12	204.583	12	204.583	12	204.583	12	204.583	12	204.583	12	204.583	12	204.583	12	1.022.914

1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	daya air dan listrik	Bulan	12	12	160.000	12	164.800	12	164.800	12	164.800	12	12	819.200
1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	880.108	12	1.020.649	1.020.649	12	1.020.649	12	1.020.649	12	12	4.962.704
1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bulan	12	12	610.000	12	610.000	610.000	12	610.000	12	610.000	12	12	3.050.000
1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	12	54.360	12	54.360	54.360	12	54.360	12	54.360	12	12	271.800
1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bulan	12	12	74.364	12	74.364	74.364	12	74.364	12	74.364	12	12	371.820
1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Paket	1	1	141.384	1	281.925	281.925	1	281.925	1	281.925	1	1	1.269.084

1	03	02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Infrastruktur Sumber Daya Air Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Baik	%	80,00	80,00	77,80	24.842,323	80,00	25.000.000	82,50	25.000.000	85,00	25.000.000	87,50	25.000.000	87,50	124.842.323
2	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan konservasi SDA yang terbangun dan terpelihara	%	7	6	6	925.000	6	925.000	6	925.000	6	925.000	6	925.000	6	4.625.000
2	2.01	1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	Unit	2	2	2	105.000	2	105.000	2	105.000	2	105.000	2	105.000	10	525.000
2	2.01	6	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah embung yang terbangun	Unit	3	0	0	-	0	-	0	-	1	500.000	2	500.000	2	1.000.000
2	2.01	49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah embung yang terpelihara	Unit	4	4	4	770.000	4	770.000	4	770.000	1	270.000	14	270.000	14	2.850.000
2	2.01	62	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah money SDA yang dilaksanakan	Unit	3	3	3	50.000	3	50.000	3	50.000	3	50.000	3	50.000	15	250.000

1	03	08	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik	%	80,13	80,13	81,14	81,14	900.000	81,14	81,14	1.463.455	82,15	1.272.019	83,16	4.880.874	83,84	4.390.029	83,84	12.906.377
8	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Prosentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik	%	80,13	80,13	81,14	81,14	900.000	81,14	81,14	1.463.455	82,15	1.272.019	83,16	4.880.874	83,84	4.390.029	83,84	12.906.377
8	2.01	2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung daerah kabupaten/kota yang terbangun	Pemohon	4	4	5	5	-	5	5	400.000	5	300.000	2.300.000	2.050.000	20	2.050.000	5.050.000	
8	2.01	1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung,	Jumlah Pemohon Penyelenggaraan Penerbitan IMB dan SLF melalui SIMBEG oleh Tim Ahli Bangunan Gedung	Unit	300	300	400	400	150.000	400	400	154.500	450	159.135	500	163.909	550	168.827	2250	796.371

8	2.01	4	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Unit	7	8	-	9	33.075	10	34.728	11	36.464	12	38.287	50	142.554		
8	2.01	5	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan	7	8	50.000	9	51.500	10	53.045	11	54.636	12	56.275	50	265.456		8
8	2.01	9	Penilaian terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	Unit	75	87	-	100	24.380	112	25.111	125	25.865	137	26.640	561	101.996		8
8	2.01	13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Unit	3	2	700.000	4	800.000	4	700.000	4	2.300.000	4	2.050.000	18	6.550.000		8

1	03	09	Persentase Bangunan dan Lingkungan yang Tertangani	%	13,04	13,04	13,91	3.061.000	13,91	579,481	15,00	593,455	15,00	608,127	15,00	623.533	15,00	5.465.596	1
9	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan yang di Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	5	3.061.000	5	579,481	5	593,455	6	608,127	22	623.533	22	5.465.596	9
9	2.01	5	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	zak	0	6.000	6.000	3.061.000	6.000	300,000	6.000	300,000	6.000	300,000	85220	300.000	85220	4.261.000	9
9	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	5	-	5	279,481	5	293,455	6	308,127	22	323.533	22	1.204.596	9
1	03	10	Persentase Jalan Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	%	70,94	70,94	76,23	104.063.300	74,23	104,908.977	79,48	122,036.029	82,23	100,000.000	85,18	100.000.000	85,18	531.008.306	
10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Km	24	24	24,84	104.063.300	24,62	104,908.977	30,84	122,036.029	24,84	100,000.000	130,00	100.000.000	130,00	531.008.306	
10	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta	Unit	22	22	20	1.500.000	20	1.500,000	20	1.500,000	20	1.500,000	100	1.500,000	100	7.500.000	

10	2.0 1	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Jumlah panjang jalan yang terpelihara secara rutin	K m	5	5	62,00	12.400.000	62,00	12.400.000	62,00	12.400.000	62,00	12.400.000	62,00	12.400.000	12.400.000	62,00	12.400.000	310	62.000.000
11	2.0 1		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah kegiatan penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi	Ke giatan ta n	0	0	2	192.724	2	304.460	2	310.595	2	310.595	2	310.595	192.724	2	310.595	10	1.423.456
11	2.0 1	4	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah pelatihan	Ke giatan ta n	0	0	1	132.462	1	204.460	1	210.595	1	210.595	1	210.595	132.462	1	210.595	5	963.194
11	2.0 1	7	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah kegiatan yang diadakan	Ke giatan ta n	0	0	1	60.262	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	60.262	1	100.000	5	460.262
11	2.0 2		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota	Ke giatan ta n	60	60	62	147.250	62	151.410	62	160.905	62	160.905	62	160.905	147.250	62	160.905	310	781.513
11	2.0 2	1	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah pemohon rekomendasi layanan informasi jasa konstruksi	Pe m oh on	60	60	60	47.250	60	48.668	60	51.630	60	51.630	60	51.630	47.250	60	51.630	300	250.856
11	2.0 2	7	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Jumlah dokumen yang tersusun	Do ku me n	60	60	2	100.000	2	102.743	2	109.275	2	109.275	2	109.275	100.000	2	109.275	10	530.658
11	2.0 3		Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah penerbitan rekomendasi izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Pe m oh on	100	100	110	47.250	120	48.667	130	51.630	140	51.630	150	51.630	47.250	120	48.667	650	250.854
11	2.0 3	2	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan	Jumlah pemohon penerbitan	Pe m	100	100	110	47.250	120	48.667	130	51.630	140	51.630	150	51.630	47.250	120	48.667	650	250.854

1	03	12	Penerbitan Rekomendasi Teknis IJJK Nasional	rekomendasi teknis IJJK Nasional	oh on	75,00	75,00	91,15	1.540.800	91,25	835,691	91,35	866,984	91,45	899,603	91,55	933,605	91,55	5.076,683
12	2.01		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Lahan dengan Pola Ruang RTRW	%														
12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rekomendasi RRRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Do ku ku me n	2	2	2	1.145.480	2	440,271	2	471,564	2	504,183	2	538,185	2	3.099,683
12	2.01	1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi dan Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rekomendasi RTRW yang tersusun	Do ku ku me n	1	1	1	100.000	1	50,000	1	50,000	1	50,000	1	50,000	5	300,000
12	2.01	2	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi dan Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RRTR yang tersusun	Do ku ku me n	1	1	1	1.045.480	1	390,271	1	421,564	1	454,183	1	488,185	5	2.799,683
12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan koordinasi penyusunan RTRW dan RRTR yang dilaksanakan	Ke giat giat ta n	26	28		145.400	27	145,500	27	145,500	27	145,500	27	145,500	27	727,400
12	2.02	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah rapat koordinasi penyusunan RTRW yang dilaksanakan	Ke giat giat ta n	12	12		50.000	12	50,000	12	50,000	12	50,000	12	50,000	12	250,000
12	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah rapat koordinasi penyusunan RRTR yang dilaksanakan	Ke giat giat ta n	12	12		50.000	12	50,000	12	50,000	12	50,000	12	50,000	12	250,000
12	2.02	3	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	Ke giat giat ta n	2	2	2	45.400	3	45,500	3	45,500	3	45,500	3	45,500	14	227,400

12	2.0 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pemanfaatan ruang yang tersusun	Do ku me n	100	110	195.400	120	195.400	130	195.400	140	195.400	150	195.400	150	977.000
12	2.0 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen KRK yang tersusun	Do ku me n	100	110	100.000	120	100.000	130	100.000	140	100.000	150	100.000	650	500.000
12	2.0 3	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah informasi tata ruang yang terupdate	%	100	100	95.400	100	95.400	100	95.400	100	95.400	100	95.400	100	477.000
12	2.0 4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota	Ke gia ta n	0	12	54.520	12	54.520	12	54.520	12	54.520	12	54.520	12	272.600
12	2.0 4	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah koordinasi TKPRD yang terfiksana	Ke gia ta n		12	54.520	12	54.520	12	54.520	12	54.520	12	54.520	12	272.600
2	10	Pertanahan					-				100.000		100.000		100.000		400.000
2	10. 04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Penanganan Sengketa Lahan	%	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400.000
2	10. 04. 2.0 1	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Sengketa Lahan	%	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400.000
2	10. 04. 2.0 1	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rapat koordinasi	Ke gia ta n	0	12	-	12	-	12	100.000	12	100.000	12	100.000	12	400.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

2.4. Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen diukur berdasarkan Tingkat Capaian Kinerja Sasaran Strategis sesuai dengan Program dan Kegiatan, dan untuk mengetahui tingkat capaian kinerja sasaran dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi indikator sasaran, sedangkan untuk mengetahui tingkat capaian kinerja kegiatan dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi indikator kegiatan yang meliputi Input (Masukan), Output (Keluaran) dan Outcome (Hasil). Adapun Capaian Kinerja Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut :

1. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2022 mendapatkan kategori sangat baik, dapat terlihat pada table berikut :

Tabel Target dan Realisasi Kinerja sasaran
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2022

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target Renstra	Realisasi	Capaian	Kategori
	Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	53,81	Realisasi dicukupi dari DPUPR dan DISPERKIMHUB		
	Meningkatnya Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	57,35	57,89	100,9	Sangat baik

Sumber : DPUPR 2022

Pada tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki indikator sasaran yaitu indeks Infrastruktur Pekerjaan umum dengan target sesuai rencana strategis yaitu 57,35 %. Sedangkan untuk ralisasi capaian indikator infrastruktur pekerjaan umum pada tahun 2022 sebesar 57,89 % sehingga capaian Kinerja melampaui target yaitu 100,9 %, adapun rumus perhitungan realisasi yaitu :

Realisasi (Persentase Infrastuktur Sumber Daya Air Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Baik + Persentase Pelayanan Air Bersih Perpipaan + Persentase Jalan Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Mantap)

Tabel :

Perbandingan Capaian Kinerja

kinerja Dinas Pekerjaan Umum dari tahun 2020 sampai dengan 2022

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020, 2021 dengan 2022

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun n-2 (2020)			Tahun n-2 (2021)			Tahun n (2022)		
			Tar.	Rea.	Cap.	Tar.	Rea.	Cap.	Tar.	Rea.	Cap.
	Meningkatnya Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum		56,15			56,55		57,35	57,89	100,9

3. Kemajuan Capaian sasaran strategis

Tabel Kemajuan sasaran strategis DPUPR tahun 2022

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target 2026	Tingkat kemajuan
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	57,89	65,89	88,05 %

Sumber :DPUPR 2022

4. Analisis keberhasilan, kegagalan dan solusi

Sesuai dengan Sasaran Dinas Pekerjaan umum dan Penataan ruang yaitu meningkatnya indeks Kualitas Infrastruktur Daerah. Sasaran ini didukung oleh 1 (satu) indikator sasaran yaitu Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum. Rumus perhitungan indikator Persentase tingkat pelayanan infrastruktur Pekerjaan umum dengan menggunakan penjumlahan antar indikator pendukung yaitu:

(Persentase Infrastuktur Sumber Daya Air Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Baik + Persentase Pelayanan Air Bersih Perpipaian + Persentase Jalan Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Mantap) : 3

Target Renstra

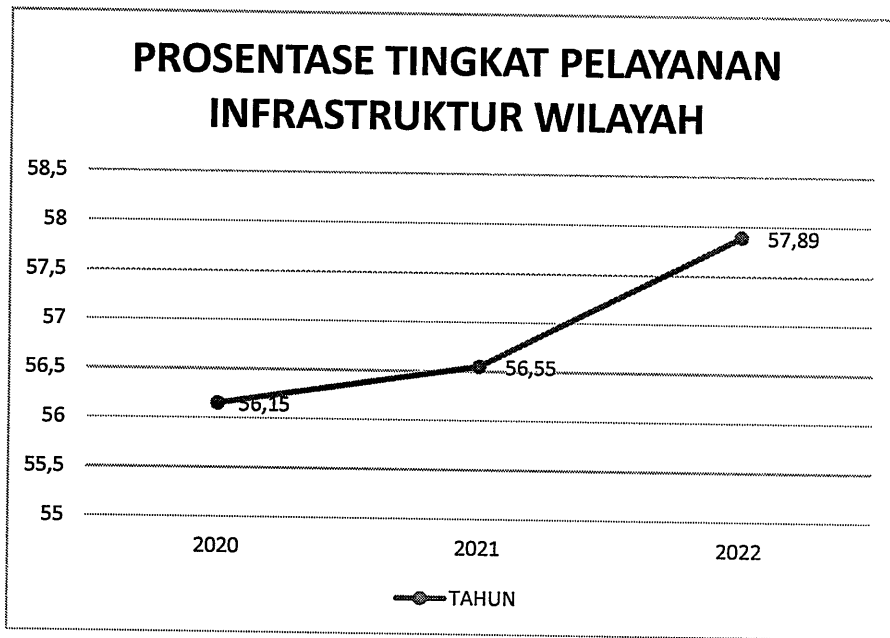
Adapun realisasi dan capaian kinerja tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian	Analisis Keberhasilan/kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	57,35	57,89	100,9%	Sesuai rumus perhitungan realisasi	

Berdasarkan Tabel diatas Realisasi Capaian Kinerja DPUPR tahun 2022 melampaui target atau masuk dalam kategori sangat baik. Sedangkan untuk pencapaian kinerja program dan kegiatan dan tergambar pada table berikut

Realisasi kinerja Meningkatnya Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah
Tahun 2021 s/d Tahun 2022



Meningkatkan Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah, didukung oleh 3 (tiga) Indikator Program, sebagai berikut :

1. Capaian Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap

Panjang jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kebumen sesuai Data Dasar Prasarana Jalan Kabupaten/Kota Tahun 2022 adalah 960,358 kilometer. Dimana Proporsi jalan Kabupaten Kebumen yang rusak berat masih terdapat 89,312 Km atau sebesar 9,30 % yang lokasinya tersebar di 22 wilayah yaitu kecamatan Ayah, Rowokele, Buayan, Sempor, Kuwarasan, Petanahan, Puring, Adimulyo, Karanggayam, Sadang, Karangsambung, Alian, Pejagoan, Petanahan, Sruweng Klirong, Poncowarno, Kutowinangun, Prembun, Ambal, Mirit, Padureso. Adapun data panjang dan proporsi jalan berdasarkan kondisi tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel Panjang dan Proporsi Jalan Berdasarkan Kondisi Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

NO.	URAIAN	Kondisi awal	PANJANG JALAN (km)
		2021	2022
1	Kondisi Baik	584,109	292,179
2	Kondisi Sedang	167,516	416,841
3	Kondisi Rusak Ringan	115,411	162,026
4	Kondisi Rusak Berat	93,322	89,312
5	Jalan secara keseluruhan	960,358	960,358
Proporsi Kondisi Baik (%)		60,82%	30,424
Proporsi Kondisi Sedang (%)		17,44%	43,405
Proporsi Kondisi Rusak Ringan (%)		12,02%	16,871
Proporsi Kondisi Rusak Berat (%)		9,72%	9,30

Sumber: DPUPR Kabupaten Kebumen, 2022

Perhitungan realisasi menggunakan Prosentase Perbandingan (jumlah panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap / jumlah panjang jalan kabupaten x 100%).

Pada tahun 2022 total panjang jalan kabupaten adalah 960,358 Km, adapun realisasi kinerja DPUPR terkait capaian jalan kabupaten dalam kondisi mantap pada awal tahun 2022 adalah sepanjang 709,020 kilometer atau mencapai sebesar 73,83 %. Kondisi ini mengalami penurunan status jalan dari kondisi baik ke kondisi sedang, yaitu sebesar 30,40 %. jika dibandingkan dengan tahun tahun 2021 jalan kondisi mantap pada tahun 2022 mengalami penurunan sepanjang 42,605 Kilometer atau mencapai 4,44 %.

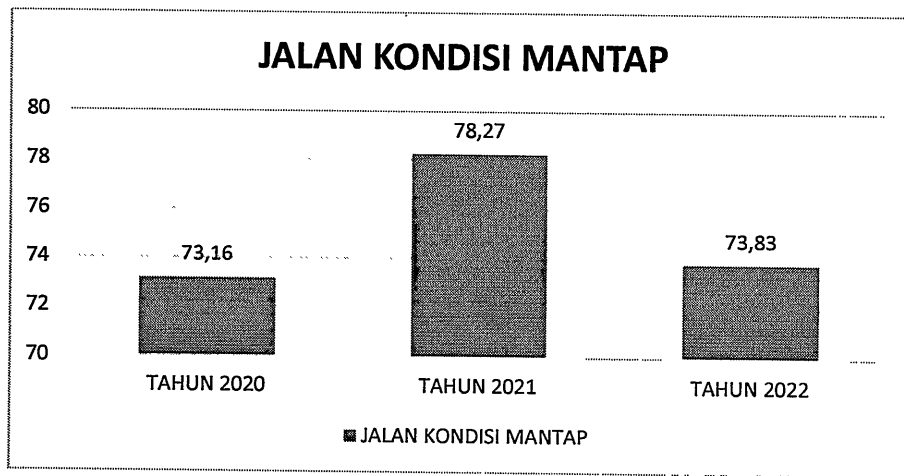
Sedangkan dalam target RPJMD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten kebumen pada tahun 2022 sebesar **74,23 %** dengan realisasi **73,83 %**. belum tercapai sesuai dengan target yang sudah direncanakan sebelumnya dikarenakan pada tahun 2022 jalan dengan kondisi rusak ringan mengalami peningkatan sebesar 4,85% atau sepanjang 46,615 km.

Tabel 9
Capaian Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap Tahun 2022

No	IKU OPD, Program / Kegiatan Pendukungnya	Satuan	Kondisi awal Th.2021	TAHUN 2022			T.Akhir RPJMD 2021
				Tar.	Real	Cap	
1	Capaian jalan kabupaten dalam kondisi mantap	%	78,27	74,23	73,83	99,77	82,00

Tabel 10
Ketersediaan Jalan Sesuai Kondisi Di Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA RPJMD 2021-2026	REALISASI KINERJA TAHUN 2021	REALISASI KINERJA TAHUN 2022	REALISASI KINERJA TAHUN 2023	REALISASI KINERJA TAHUN 2024	REALISASI KINERJA TAHUN 2025	REALISASI KINERJA TAHUN 2026
KONDISI JALAN							
a. BAIK	-	584,109	292,179	-	-	-	-
b. SEDANG	-	167,516	416,841	-	-	-	-
c. RUSAK RINGAN	-	115,411	162,026	-	-	-	-
d. RUSAK BERAT	-	93,322	89,312	-	-	-	-



Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, dilakukan melalui beberapa Sub. Kegiatan yaitu : Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan, Survey Kondisi Jalan/Jembatan, Pembangunan Jalan, Pelebaran Jalan Menuju Standar, Pemeliharaan Berkala Jalan, Pemeliharaan Rutin Jalan, dan Pemeliharaan Berkala Jembatan,

Sedangkan Alokasi anggaran untuk mencapai sasaran tersebut baik yang bersumber dari APBD, APBD (DAU) sebesar Rp. 122.414.582.000 sedang realisasinya sebesar Rp.118.227.222.918 (96,58%).

2. Cakupan Pelayanan Air Bersih

Rumus Perhitungan Realisasi Menggunakan Persentase Perbandingan (Jumlah RT terlayani air bersih / jumlah rumah tangga) x 100.

Pada tahun 2022 Jumlah rumah tangga yang sudah terlayani air bersih sebesar **447.218 kk** Sedangkan jumlah rumah tangga yang berhak mendapatkan pelayanan sebesar **461.823 kk**, adapun Capaian indikator sarasannya sebesar **96,84%**. Capaian pelayanan air bersih sesuai dengan SPM mencakup keseluruhan dengan 3 (tiga) sumber perolehan air dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu melalui PDAM, SPAM Pedesaan dan Sumber air lain (Sumur, langsung dari mata air). namun angka tersebut belum memenuhi target yang ditetapkan dalam SPM yaitu **100%** rumah tangga telah memiliki akses air minum. Dengan permasalahan terbatasnya sumber mata air bersih, sumber akses air minum belum layak dan kondisi geografis kabupaten kebumen dan Ketersediaan Dana

Tabel 11 INDIKATOR SPM
Capaian pelayanan air bersih sesuai dengan SPM
Kabupaten Kebumen Tahun 2022

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TAHUN 2022							Keterangan (Permasalahan)
		Jumlah Orang yang berhak mendapat layanan	Jumlah orang yang Terlayani				Capaian = (7):(3)x100%	TARGET	
			PDAM	SPAM PERDESAAN	SUMBER AIR LAIN	JUMLAH = (4)+(5)+(6)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1. Penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan pokok air sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	461.823	34.440	48.509	364.269	447.218	96,84%	100%	Ketersediaan Dana & Mata Air

Tabel 12 Indikator Program
Realisasi Capaian pelayanan air bersih perpipaan Kabupaten Kebumen

INDIKATOR PROGRAM	TAHUN 2022					
	Total Jumlah Penduduk Seluruhnya	JUMLAH ORANG YANG TERLAYANI			JUMLAH = (3)+(4)	CAPAIAN= (5): (2)x100%
		SAMBUNGAN RUMAH TAHUN 2022	PDAM	SPAM PERDESAAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Prosentase Pelayanan air Bersih Perpipaan Tahun 2022	1.409.951	82.949	137.760	194.036	331.796	23,53%

Sumber: DPUPR Kabupaten Kebumen, 2022

Prosentase Pelayanan air Bersih Perpipaan pada Tahun 2022 yang melalui jalur perpipaan yang digunakan *rumah tangga sejumlah 331.96 jiwa sedangkan Total Jumlah Penduduk Seluruhnya pada tahun 2022 sebesar 1.409.951 jiwa atau realisasi sebesar 23,53 % lebih tinggi dari target OPD yang direncanakan sebesar 20%.*

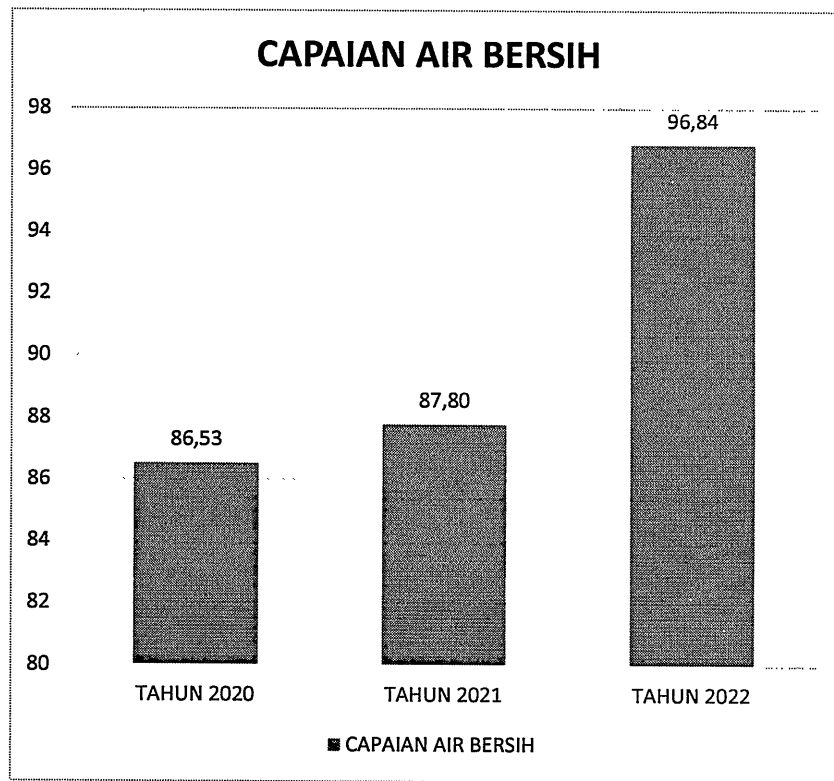
Keberhasilan indikator ini didukung oleh anggaran yang memadai, perencanaan yang baik, serta ketersediaan sumber mata air dan pengelola (Kelompok Pengelola SPAM), apabila sumber mata air banyak dan pengelolaan yang baik berkelanjutan maka bangunan akan berfungsi dengan baik, sehingga air bersih dapat tersalurkan ke masyarakat yang membutuhkan terutama bagi daerah yang krisis air bersih.

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut dilakukan melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Adapun Keegiatannya Meliputi : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota, Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan.

indikator ini didukung oleh ketersediaan anggaran baik dari APBD/DAK serta didukung oleh 1 (satu) Program dan 4 (Empat) kegiatan. Sedangkan Alokasi anggaran untuk mencapai sasaran capaian jalan dalam kondisi mantap yang bersumber dari APBD dan DAK sebesar Rp. 8.115.337.000,00 adapun realisasinya sebesar Rp. 7.184.097.988,00 (88,52%)

Tabel 13
Capaian Sasaran Strategis
Cakupan Pelayanan Air Bersih dari Tahun 2022

No	IKU OPD, Program/Kegiatan Pendukungnya	Satuan	Kondisi awal Th.2021	TAHUN 2022			Target .Akhir RPJM 2021
				Target	Real	Ca paian	
1	Cakupan pelayanan air bersih	%	87.80	100,00	96,84	96,84	100,00



3. Capaian Jaringan Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik

Rumus perhitungan realisasi menggunakan perbandingan (jumlah luasan jaringan irigasi dalam kondisi baik / total luasan jaringan irigasi x 100%).

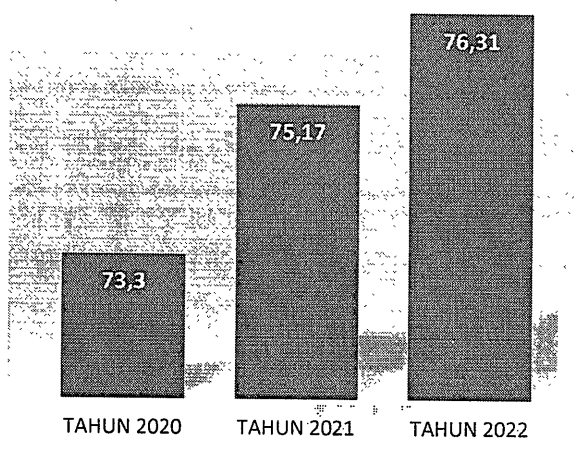
Pada Tahun 2022 total luasan jaringan irigasi adalah 12.260,01 Ha, kondisi baik sebesar 9.355,04 Ha (76,31%), kondisi sedang sebesar 185,02 Ha (1,51%), kondisi rusak ringan sebesar 151,35 Ha (1,23%), dan kondisi rusak berat sebesar 2.568,6 Ha (20,95%). Jika dibandingkan dengan Tahun Lalu capaian jaringan irigasi dalam kondisi baik naik sebesar 138, 780 ha atau (1,13%) . itu menandakan bahwa kinerja DPUPR telah sesuai target yang telah ditetapkan. Meskipun begitu masih ada banyaknya saluran irigasi dan bendungan yang masih mengalami kerusakan sebesar 2568,6 ha dan masih membutuhkan perbaikan dan perawatan.

Tabel 14
Capaian Jaringan Irigasi kabupaten Dalam Kondisi Baik

No	IKU OPD, Program/ Kegiatan Pendukungnya	Satuan	Kondisi awal Th 2021	TAHUN 2022			T. Akhir RPJM D 2021
				Target	Real	Capaian	
1	Capaian jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	75,17	77,8	76,31	98,08	87,5

CAPAIAN IRIGASI KONDISI BAIK

■ CAPAIAN IRIGASI KONDISI BAIK



Untuk mencapai sasaran strategis tersebut dilakukan melalui Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Adapun Sub.kegiatannya adalah Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa, Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah, Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan, dan Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi.

Adapun Alokasi anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut baik yang bersumber dari APBD/DAK sebesar Rp 9.959.132.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 8.227.602.826,00(82,61%)

Adapun Faktor pendukung dalam pencapaian target Persentase tingkat pelayanan infrastruktur wilayah adalah :

1. Komitmen Pemerintah Daerah
2. Dukungan Pemerintah Pusat dalam Pengalokasian Dana Alokasi Khusus yang diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi
3. Perbaikan kinerja seluruh jajaran pendukung pengelolaan kegiatan yang berkaitan dengan perbaikan dan pembangunan infrastruktur baik dari pemerintah maupun pihak swasta.
4. Dukungan seluruh masyarakat kabupaten kebumen

Berdasarkan data Capaian Kinerja Persentase tingkat pelayanan infrastruktur wilayah sudah tercapai sesuai yang ditargetkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, akan tetapi dalam proses pencapaian terdapat beberapa permasalahan dan upaya dalam mengatasi permasalahan yang ditempuh diantaranya sebagai berikut :

a. Permasalahan

- a) Masih banyak ditemukan infrastruktur jalan rusak yang disebabkan oleh kelebihan muatan (tonase) pengguna jalan yang tidak sesuai dengan kelas jalan, umur efektif dan umur ekonomis jalan yang banyak berkurang maupun akibat bencana alam.
- b) Masih banyak ditemukan masyarakat yang kesulitan dalam mobilisasi arus barang dan jasa antar wilayah dengan jarak tempuh cukup jauh, hal ini disebabkan karena masih terbatasnya bangunan jembatan penghubung antar wilayah.
- c) Masih ditemukan masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih, hal ini disebabkan banyaknya instalasi pengolahan air bersih perdesaan yang tidak berfungsi dengan baik karena pengelolaan yang tidak maksimal maupun yang rusak karena kekeringan sumber mata air disamping pola konsumsi air bersih warga sebagian masih mengandalkan air bersih non perpipaan

- d) Kurang optimalnya fungsi bangunan drainase dengan masih ditemukan genangan air.
- e) Banyak daerah yang belum terjangkau aliran air irigasi sehingga masyarakat masih sulit mendapatkan air irigasi untuk pertanian pada musim kemarau
- f) Belum optimalnya penataan ruang di wilayah Kabupaten Kebumen, hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan ruang dan kurangnya pengawasan serta pengendalian dan sosialisasi mengenai tata ruang di wilayah Kabupaten Kebumen.
- g) Adanya alih fungsi sawah beririgasi yang tidak sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah.

b. Upaya mengatasi Permasalahan

1. Mengoptimalkan kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan serta pengembangan dan pemanfaatan peralatan, jalan secara rutin dan berkala yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan yang ada.
2. Mengoptimalkan kegiatan Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan yang ada.
3. Pengadaan sumber air minum menggunakan skema kegiatan SPAM antar Desa sangat membantu Masyarakat untuk dapat memperoleh pelayanan air minum
4. Mengembangkan pemanfaatan air bersih, dan meningkatkan pengelolaan drainase secara optimal serta berkelanjutan
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

2.5. Realisasi Anggaran Belanja

Pada tahun 2022, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen melaksanakan 23 (dua puluh tiga) Kegiatan dan 59 (lima puluh sembilan) Sub Kegiatan, dengan total anggaran sebesar Rp.182.611.506.000,00 dan realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 172.839.342.389,00 (94,65%), sehingga terdapat sisa sebesar Rp. 9.772.163.611 ter

Tabel 16
Capaian Realisasi Keuangan Tahun 2022
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen

No	Bidang	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1	Bagian Sekretariat	22.897.489.000	22.290.187.111	607.301.889	97,65
2.	Bidang Tata Ruang	1.281.682.000	1.158.606.473	123.075.527	90,40%
3.	Bidang Bina Marga	122.414.582.000	118.227.222.918	4.187.359.082	95,58%
4	Bidang Cipta Karya	16.620.726.000	15.326.311.362	1.294.414.638	92,21%
4	Bidang Sumber Daya Air	19.397.027.000	15.837.014.525	3.560.012.475	81,65%
	Jumlah Total	182.611.506.000	172.839.342.389	9.772.163.611	94,65%

Tabel 17
Sisa Tender Anggaran
Tahun 2022

No	Nama Bidang	Jumlah Paket	Jumlah Pagu	Jumlah Nilai Kontrak	Sisa Tender
1	Bidang Bina Marga	236 Paket	109.009.231.055	106.684.706.055	2.324.525.000
2	Bidang Cipta Karya	54 Paket	12.614.930.000	10.838.040.000	1.776.890.000
3	Bidang Sumber Daya Air	68 Paket	20.011.880.000	15.633.648.688	4.378.231.312
	TOTAL	358 Paket	141.636.041.055	133.156.394.743	8.479.646.312

Dalam Evaluasi Akuntabilitas Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen ini berdasarkan pada Rencana Anggaran tahun 2022 dengan realisasi penyerapan rata – rata sebesar 94,65% pada dasarnya kegiatan dapat berjalan sesuai dengan Program/Kegiatan yang telah direncanakan, sampai dengan akhir 31 Desember 2022.

BAB IV PENUTUP

2.6. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen, sebagai berikut :

1. Realisasi capaian kinerja secara keseluruhan sebesar **94,65%**. Untuk mendukung apa yang telah ditetapkan visi, misi, tujuan, sasaran kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen tahun 2022 telah disediakan dana sebesar Rp. 182.611.506.000,00 dan realisasi sampai dengan akhir 31 Desember tahun 2022 sebesar Rp. 172.839.342.389,00.
2. Secara umum dari semua rencana tingkat capaian (target) dari tiap-tiap kegiatan yang ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen dikategorikan baik, meskipun ada beberapa program dan Sub. kegiatan yang realisasinya tidak sesuai dengan rencana, antara lain : Sub. Kegiatan Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan, Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota, Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota, Sub Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya, Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota, Sub Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah, Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan, Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi,
3. Perlu pencermatan Kembali dalam penentuan target pada beberapa kegiatan dan indikator kinerja dan besaran anggaran, sehingga tidak terjadi Kembali capaian kinerja yang dibawah target perencanaan.

2.7. Rekomendasi

1. Perlu Dukungan Anggaran Pendamping baik dari Pusat, Banprov serta APBD, Kabupaten dalam Pengalokasian Dana Alokasi Khusus yang diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi sehingga kegiatan-kegiatan yang kerjanya belum dapat mencapai target dapat selesai sesuai yang sudah direncanakan/dijadwalkan.
2. Perlunya Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan mengirimkan menjadi peserta diklat teknis
3. Penetapan target kinerja disesuaikan dengan mempertimbangkan anggaran kas yang ada, termasuk besarnya anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan.
4. Perlu pencermatan Kembali dalam penentuan target pada beberapa kegiatan dan indikator kinerja dan besaran anggaran, sehingga tidak terjadi Kembali capaian kinerja yang dibawah target perencanaan.
5. Perbaiki kinerja seluruh jajaran pendukung pengelolaan kegiatan yang berkaitan dengan perbaikan dan pembangunan infrastruktur baik dari pemerintah maupun pihak swasta.
6. Perlu adanya dukungan seluruh masyarakat Kabupaten Kebumen

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen tahun 2022 yang dapat kami susun sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dengan harapan bermanfaat bagi semua pihak, atas segala kritik dan saran yang sifatnya membangun kami ucapkan terima kasih.

Kebumen, 6 Februari 2023
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Kebumen



JONI HERNAWAN, S.T.,M.T
NIP. 19700728 199803 1 006